

PARTISIPASI AKTIF INTELEKTUAL MUDA MUSLIM DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT

Yanwar Pribadi

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Pendahuluan

Salah satu cara penting untuk mendorong laju pembangunan, memenuhi kebutuhan pokok, dan menciptakan lapangan kerja adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Masyarakat yang terlatih dan terdidik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas tersebut. Untuk menciptakan masyarakat yang terlatih dan terdidik diperlukan banyak aspek yang perlu diusahakan oleh negara dan masyarakat itu sendiri. Namun, hanya menanti campur tangan pemerintah saja tidaklah cukup bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas mereka sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi seluruh masyarakat, tidak hanya sebagai perseorangan, tetapi lebih penting lagi sebagai sumber daya sosial: himpunan, kelompok, lembaga, dan pranata sosial yang dapat meningkatkan potensi masyarakat.

Dengan 87,18 % penduduk Muslim atau sekitar 207.176.162 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa (BPS: Sensus Penduduk 2010), Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Namun, data statistik ini tidaklah berarti apa-apa karena Indonesia bukanlah negara yang dapat dikategorikan sebagai negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya baik atau merata.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, pertumbuhan Muslim di Indonesia pun tercatat relatif tinggi. Muslim di Indonesia secara etnis dan

sosial-budaya menunjukkan tingkat diversifikasi yang tinggi. Kebanyakan Muslim di Indonesia adalah orang-orang yang terlahir sebagai Muslim dari orang tua Muslim. Ditinjau dari segi budaya, kebanyakan Muslim di Indonesia mengembangkan kebudayaan Islam yang khas, yang relatif berbeda dengan kebudayaan Islam yang berkembang di Timur Tengah.

Dalam bidang ekonomi, sudah menjadi rahasia umum jika mayoritas umat Islam dunia, termasuk Indonesia, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Data yang pasti tentang GNP atau penghasilan perkapita orang-orang yang beragama Islam tidak kita miliki. Fakta di lapangan menunjukkan jumlah orang miskin dan pengangguran Muslim semakin bertambah.

Rencana perekonomian yang dibangun oleh tim ekonomi pemerintah dinilai banyak pengamat kurang berhasil. Kenyataan menunjukkan bahwa rencana-rencana tersebut sebagian besar hanya masuk “gudang ide” tanpa pernah bisa didistribusikan dengan baik. Tim ekonomi yang dibentuk lebih banyak bermain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nuansa politis sangat kental mewarnai perencanaan kebijakan yang dibuat oleh tim ekonomi. Bahkan penentuan tim ekonomi itu sendiri dicap oleh banyak pihak sebagai suatu “perang tarik ulur kepentingan”, sehingga yang akhirnya dihasilkan adalah suatu keadaan di mana perencanaan kebijakan itu tidak dapat menemui sarannya.

Sementara itu perekonomian perencanaan pusat yang telah mengklaim dapat menjamin sasaran-sasaran material, bukan saja telah gagal klaimnya, melainkan juga telah mengalami krisis ekonomi serius, yang tidak diragukan lagi meniscayakan kegagalan sistem tersebut. Oleh karena itu, perlu dicari sebuah cara yang tepat dan formula yang mujarab untuk jangka waktu yang panjang demi terciptanya sebuah tatanan perekonomian negara yang stabil dan mampu menjawab tantangan ekonomi global. Pemerintah perlu berpikir tentang perlunya perencanaan kebijakan strategis untuk jangka panjang. Jangan sampai rencana kebijakan strategis itu menjadi salah sasaran.

Tulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran bagaimana masyarakat Muslim memerlukan formula yang tepat untuk dapat membangun diri mereka sendiri. Pemikir-pemikir Muslim yang terdiri dari cendekiawan “senior” yang biasanya sudah matang dalam pemikiran beserta generasi muda yang terdiri dari mahasiswa dan kelompok-kelompok terdidik lainnya adalah unsur inti pembentuk intelektual Muslim. Yang menjadi fokus perhatian tulisan ini adalah kelompok yang kedua, yaitu intelektual muda Muslim. Kelompok ini diharapkan mampu membangun dan memberdayakan masyarakat demi kesejahteraan umat. Dalam hal yang lebih spesifik, mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten diharapkan menjadi bagian dari intelektual muda Muslim yang akan turut membangun bangsa Indonesia.

Keterbelakangan Ekonomi Negara-negara Muslim

Kita dapat melihat bahwa negara-negara Islam sekarang mengalami keterbelakangan ekonomi secara menyeluruh yang dalam hal ini ditandai oleh kenyataan tidak atau kurang dapat dimanaftkannya sumber-sumber manusia maupun alamnya sehingga mengakibatkan merajalelanya kemiskinan, kemandegan, dan kemunduran. Kenyataan yang berlawanan dalam dunia Islam itu adalah bahwa ia memiliki banyak sumber kekayaan, tetapi secara ekonomi ia miskin dan lemah. Memang perencanaan pembangunan dilakukan di beberapa negara Muslim. Di beberapa negara, perencanaan ini bahkan sudah sampai pada tingkat yang agak maju. Nigeria, Mesir, Syria, Aljazair, Iran, Pakistan, dan Malaysia adalah beberapa negara yang bisa dijadikan contoh dalam hal ini. Namun demikian, hampir di semua negara tersebut kegiatan pembangunannya dilakukan dengan mengikuti model dasar yang dikembangkan para pemikir dan praktisi di Barat yang “menjual” konsep mereka kepada para perencana pembangunan di negara-negara Muslim itu melalui jalur diplomasi internasional, tekanan ekonomi, mobilisasi intelektual, dan beberapa cara lain yang terbuka maupun tertutup. Apapun sumber inspirasinya yang diambil, tidak

ada satu pun usaha yang bisa disebut sebagai usaha yang mencerminkan pengkajian kembali gagasan-gagasan pembangunan ekonomi yang mendasar menurut ide-ide dan nilai-nilai Islam dan peranannya di dunia ini.

Proses pembangunan pada negara Muslim harus diarahkan menuju sasaran induk yang tentu berbeda dengan sasaran pembangunan yang tidak islami. Dalam pandangannya tentang manusia yang menyeluruh, maka upaya pembangunan yang islami bertujuan menyeimbangkan antara keperluan material dan rasional dengan keperluan rohani dan mental. Bahkan dalam masalah yang paling sederhana pun, Islam selalu menganjurkan pada sikap yang moderat dan tidak ekstrim. Sebagaimana diingatkan bahwa yang tradisional tidak selalu menghambat pembangunan, Islam memandang secara bebas terhadap keinginan manusia akan lingkungan material; seperti kecintaannya pada kemakmuran dan hak milik. Yang ingin dilakukan Islam bukan melarang tindakan tersebut, namun memberikan perspektif yang lebih tepat, sehingga kehidupannya tidak menjadi budak manusia atau sasaran puncak kehidupannya. Hal ini akan sangat relevan jika dikaitkan dengan rencana pemerintah merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.

Jadi, tidak mungkin pemerintah merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi dalam kerangka keterbatasan sumber-sumber daya langka kecuali jika pemerintah menghimpun kebutuhan-kebutuhannya, sumber-sumber daya dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kedudukannya, di mana dan ke mana kita hendak pergi. Mungkin hal itu akan dapat dilakukan lebih efektif sekiranya pemerintah mempersiapkan suatu rencana kebijakan strategis jangka panjang. Perencanaan demikian akan memungkinkan negara mengambil langkah positif terhadap semua sumber daya fisik dan manusia serta membentuk sederetan prioritas-prioritas yang telah ditentukan dengan baik. Ini akan membantu memberikan arah yang jelas bagi kebijakan pemerintah dan program-program pengeluaran serta memberikan inisiatif tindakan-tindakan efektif untuk digerakkan dalam perubahan institusional yang diperlukan, sehingga memungkinkan sektor pemerintah dan swasta memberikan

kontribusinya secara penuh.

Rencana itu tidak perlu hanya bergantung pada pemerintah sebagai sumber utama investasi dan usaha karena hal itu tidak layak dan juga tidak perlu. Setiap gerakan ke arah ini akan membuat ekonomi menjadi kurang responsif terhadap keadaan-keadaan yang sedang berubah; akan menghambat usaha dan inisiatif individu; dan malah akan mengundang kontradiksi dan persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai, seperti yang dialami oleh negara-negara sosialis yang menggunakan perencanaan ini.

Peran Agama dalam Pembangunan

Apa yang harus dilakukan oleh negara-negara Muslim adalah menguji semua klaim pada sumber-sumber daya melalui mekanisme filter nilai-nilai Islam dan memotivasi atau mengaktifkan sektor swasta, melalui reformasi moral dan institusional serta intensif-intensif ekonomi, agar memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi dan pemerataan optimal. Dengan demikian, artikulasi mekanisme filter Islam merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal itu akan membantu menentukan sasaran-sasaran ekonomi menurut prioritas yang ada dan menentukan cara-cara mencapainya. Pembentukan prioritas-prioritas dalam kerangka syariah akan membantu analisis alokasi sumber daya yang ada dan meletakkan secara tepat arah perubahan. Perlu juga ditekankan nilai-nilai Islam berkenaan dengan konsumsi, tabungan, investasi, dan etika kerja serta melengkapi program-program pendidikan untuk mendorong mereka.

Lebih lanjut, agama mempunyai peranan yang mendasar dan strategis dalam kehidupan individu maupun masyarakat, sebab yang beragama itu adalah manusianya. Hal ini berarti agama dan masyarakat mempunyai kaitan erat dan saling pengaruh-mempengaruhi antara satu sama lain. Dalam persepektif sosiologi, agama mempunyai makna ganda, yaitu dapat berperan positif bagi kehidupan suatu masyarakat karena ia dapat mempersatukan manusia yang didasarkan pada akidah, iman, dan takwa, dan di

pihak lain ia dapat berpengaruh negatif bila terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap satu atau beberapa pengertian, konsep, dan ajaran yang berasal dari kitab suci. Jika terjadi perbedaan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan perpecahan atau konflik dalam kelompok masyarakat beragama yang sama maupun yang beda agama. Singkatnya, agama dapat berperan sebagai pemersatu di satu pihak, dan dapat menimbulkan konflik sosial di pihak lain.

Urgensi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Masalah sumber daya manusia di negara-negara berkembang, khususnya di negara Muslim, adalah masalah klasik. Kualitasnya yang lemah jika dibandingkan dengan kualitas sumber daya manusia di negara-negara kapitalis sangatlah berbeda jauh. Perbedaan ini membuat daya saing di antara keduanya menjadi tidak berimbang. Negara-negara berkembang menjadi pengeksport tenaga kerja “rendahan”, kalau tidak mau disebut “buangan”, sedangkan negara-negara kapitalis menjadi pengeksport tenaga kerja “papan atas”, walaupun secara kualitas banyak yang tidak melebihi kualitas tenaga kerja lokal. Namun, asumsi yang berkembang membuat mereka lebih dihargai daripada tenaga kerja lokal.

Salah satu faktor besar yang membuat tenaga kerja dari negara berkembang kalah bersaing di negara sendiri atau di luar negeri adalah masalah pendidikan dan pelatihan. Sistem pendidikan di negara-negara berkembang masih tertinggal jauh dibanding dengan di negara-negara kapitalis. Selain itu, lemahnya pelatihan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia juga menjadi masalah tersendiri. Tenaga kerja yang banyak tersedia tidak dapat diserap karena kurangnya kualitas khusus mereka. Mereka tidak dibekali skil yang mantap untuk bersaing di zaman industri. Pola pikir yang tidak “*future oriented*” membuat mereka ketinggalan jauh dan harga ini harus dibayar mahal karena untuk mengejanya diperlukan puluhan tahun, sebab negara-negara kapitalis telah lama mengembangkan kualitas sumber daya manusianya.

Kontribusi tidak ternilai yang dapat disumbangkan oleh pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi perbaikan kualitas SDM, keadilan sosio-ekonomi yang lebih besar, dan pertumbuhan yang lebih cepat, kini diakui secara universal. Pendidikan membuka pintu persamaan sosial dan peluang ekonomi, dan telah dipandang sebagai ‘roda keseimbangan mesin sosial’. Namun, pemerintah negara-negara Muslim mengabaikan sektor yang amat penting ini dalam alokasi sumber dayanya. Bahkan melek huruf yang merupakan langkah awal dalam alur pendidikan, belum bersifat universal di kebanyakan negara Muslim. Yang sangat aneh adalah pengabaian pendidikan wanita, yang bergantung pada karakter, kesehatan, dan kemampuan generasi sekarang dan yang akan datang. Pengabaian seperti ini tidak dapat diteruskan karena akan menghancurkan jaringan kesatuan masyarakat Muslim.

Penekanan utama pendidikan harus pada “pencetakan” manusia yang produktif dan baik. Inilah yang akan membantu mobilisasi semangat dan bakat yang masih terpendam di negara-negara Muslim. Setiap mahasiswa Muslim harus dididik menjadi Muslim yang baik dan diberi motivasi kuat untuk menciptakan kualitas-kualitas ini pada dirinya. Namun, hal ini tidak memadai karena mereka masih perlu mengajarnya dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dan teknik-teknik pemasaran, manajemen, dan produksi yang paling efisien.

Sistem pendidikan sekuler di negara-negara Muslim tidak saja gagal mencetak mahasiswa yang lebih baik, yang diperkaya dengan karakteristik-karakteristik Muslim yang baik dan sadar akan tanggung jawabnya kepada masyarakat, tetapi juga gagal mencetak mereka menjadi lebih produktif dengan mengajarnya keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Sementara itu, orang-orang yang berkualitas tidak mampu memasuki lembaga-lembaga pelatihan vokasional dan teknik atau kedokteran karena langkanya fasilitas. Universitas-universitas yang ada masih mengikuti silabus konvensional yang diwariskan kepada mereka oleh penguasa kolonial, menghasilkan generasi liberal sekuler yang hanya memiliki pengetahuan menjadi pegawai sipil yang kini jumlahnya melebihi yang diperlukan.

Karena itu, terjadi peningkatan tajam jumlah 'sarjana menganggur' di wilayah-wilayah perkotaan, meskipun terdapat kelangkaan sumber daya manusia yang terlatih di sektor-sektor tertentu dalam ekonomi. Mereka yang kaya mudah mendapatkan fasilitas pendidikan teknik bagi anak-anaknya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, mereka yang miskin, yang jauh lebih memerlukannya untuk meningkatkan pendapatan dan status sosialnya tidak dapat berbuat demikian. Hal ini cenderung memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan memaksakan si miskin pada kesulitan permanen. Ini merupakan kelemahan utama sistem pendidikan yang tidak tanggap terhadap tujuan ekonomi dan realitas ekonomi dan politik yang sedang berubah di negara-negara Muslim.

Dengan demikian, diperlukan suatu perubahan substansial dalam kurikulum pendidikan dengan memasukan nilai-nilai Islam dan keterampilan-keterampilan teknik yang dibutuhkan, dan juga perlunya mendirikan suatu jaringan kelembagaan yang tersebar luas sehingga setiap anak dari keluarga miskin di wilayah pedesaan atau perkotaan kumuh mempunyai akses ke pendidikan teknik dan fasilitas pelatihan. Ini merupakan salah satu cara penting untuk menghapuskan sumber-sumber ketidakadilan dan kemiskinan dan menyediakan bagi siapa saja suatu peluang untuk maju ke depan atas dasar kemampuan dirinya dan pelatihan yang diperlukan. Karena itu reformasi peningkatan kualitas SDM ini perlu segera diberlakukan, mengingat pentingnya persaingan dengan negara-negara lain di dunia ini yang semakin lama semakin mengglobal.

Karakteristik Intelektual Muda Muslim Indonesia

Islam sebagai agama selalu mengarahkan pemeluknya untuk dapat berperan aktif di masyarakat. Generasi muda terlatih dan terdidik adalah salah satu kekuatan Islam dalam pembangunan masyarakat. Generasi ini terwujud dalam bentuk sarjana dan mahasiswa yang merupakan salah satu komponen utama intelektual Muslim. Namun, banyak intelektual Muslim Indonesia yang tidak memiliki kemampuan untuk

berperan aktif dalam pembangunan umat karena salah satu alasannya adalah bahwa banyak sarjana Muslim Indonesia selama ini kurang pandai dalam level teoretis dan tidak menguasai level praktis.

Pada batas-batas tertentu, istilah sarjana tidak siap pakai (tidak menguasai hal praktis) sesungguhnya masih bisa ditoleransi. Hal ini mengingat pembawaan dan ciri khas ilmu itu sendiri. Bahasa ilmu adalah bahasa yang tidak menyerap langsung realitas sesungguhnya. Dalam artian bahwa untuk menjangkau realitas objektif, ilmu perlu mengalami transformasi ke arah diagnostik.

Dalam hal ini, para calon sarjana harus beranjak ke laboratorium, lapangan, dan lembaga-lembaga latihan kerja untuk melakukan investigasi dan praktik medan. Jika dana universitas menjadi macet, dan tali hubungan dengan balai-balai latihan kerja menjadi tidak lancar, maka semua orang akan tahu mengapa sarjana kita tidak siap pakai. Akan tetapi, jika terbukti mereka pun tidak menguasai kepandaian teoretis, ini keterlalaan. Hal mana menunjukkan betapa rikuhnya sikap ilmiah mereka yang merupakan jebolan masyarakat ilmiah ini.

Profil Jurusan PMI

Jurusan PMI sesuai dengan visinya adalah merupakan pusat pengembangan studi Islam untuk menjadi yang terunggul, kompeten, dan terdepan dalam pengkajian dan pengembangan masyarakat Islam. Dalam tataran implementasi, jurusan ini harus mampu menjadi pusat pengembangan masyarakat Islam yang dapat memberikan kontribusi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat luas, khususnya masyarakat Islam dan melahirkan sarjana Muslim yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi yang konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat Muslim, dan dapat memberikan kontribusi aktif dalam pengembangan masyarakat Islam.

Untuk menambah wawasan tentang ilmu pengembangan masyarakat, mahasiswa

jurusan PMI dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial. Hal ini tentu saja akan berguna untuk bekal mereka ketika lulus dan menjadi pengembang masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Jurusan PMI memiliki visi 'Unggul, Kompeten, dan Terdepan dalam Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Islam 2025' (LPM IAIN "SMH" Banten, 2014: 267-274). Dengan visi tersebut, misi yang diusung adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan masyarakat Islam dan khazanah keislaman, baik yang bersifat teoritik maupun aplikatif.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan khazanah keislaman dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Islam.
3. Menjadi pusat pengembangan masyarakat Islam yang dapat memberikan kontribusi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat luas, khususnya masyarakat Islam.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik dalam dan luar negeri dan juga lembaga-lembaga penelitian dalam pengembangan khazanah keislaman dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat Islam.

Sementara itu, tujuannya adalah:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional dalam mengembangkan masyarakat Islam.
2. Menyiapkan peserta didik yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan keislaman, dan teknologi yang berlandaskan ajaran Islam.

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan keislaman, teknologi dan seni yang berlandaskan ajaran Islam, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan pemberdayaan dan taraf kehidupan masyarakat Islam.
4. Melahirkan sarjana Muslim yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi yang konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat Muslim, dan dapat memberikan kontribusi aktif dalam pengembangan masyarakat Islam.

Dengan visi, misi, dan tujuan di atas, mahasiswa Jurusan PMI yang sudah menyelesaikan perkuliahannya diharapkan dapat menjadi:

1. Pengembang masyarakat (*Community development worker*), di antaranya sebagai:
2. Pengelola program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di instansi-instansi pemerintah;
3. Pengelola *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan-perusahaan swasta;
4. Pelaku kewirausahaan sosial.
5. Tenaga kesejahteraan sosial (*Social worker*).
6. Penyuluh masalah-masalah sosial-keagamaan.
7. Peneliti bidang sosial-keagamaan.
8. Akademisi bidang sosial-keagamaan.

Sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada Kurikulum berbasis (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakkan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Berikut ini adalah Deskripsi Generik, Spesifik dan *Learning Outcome* Kurikulum berbasis KKNI Jurusan PMI:

No	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik	Learning Outcomes
1.	<p>Deskripsi generik level 6 (paragraf pertama)</p> <p><i>Mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.</i></p>	<p>1. Mampu memanfaatkan produk teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengembangan masyarakat Muslim secara terencana (intervensi sosial) pada tingkat makro, meso dan mikro</p>	<p>1. Memiliki kemampuan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menguasai teknologi informasi secara optimal serta memahami tahapan pengembangan masyarakat Islam.</p>

		2. Mampu beradaptasi terhadap dinamika pengendalian masalah dan isu-isu masyarakat Muslim yang ditangani dalam suatu tim kerja.	2. Memahami pengetahuan tentang dasar-dasar keilmuan dalam Islam dan memahami berbagai isu yang berkembang dalam masyarakat Islam serta bersikap positif dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2	<p>Deskripsi generik level 6 (paragraf kedua)</p> <p><i>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara</i></p>	1. Mampu menguasai ide-ide dasar teori sosial (<i>social theory</i>) dan pembangunan (<i>development theory</i>) untuk melakukan intervensi sosial guna mengatasi masalah-masalah dalam pengembangan masyarakat Muslim pada tingkat meso (pada organisasi, komunitas lokal), dan pada tingkat makro (kabupaten/kota, provinsi atau	3. Memiliki pengetahuan tentang ide-ide dasar teori sosial (<i>social theory</i>) dan pembangunan (<i>development theory</i>) dan memiliki pengetahuan tentang ide-ide dasar teori pekerjaan sosial (<i>social work theory</i>) serta memiliki pengetahuan

	<p><i>mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</i></p>	<p>nasional); dan/atau mampu menguasai ide-ide dasar teori pekerjaan sosial (<i>social work theory</i>) untuk melakukan intervensi sosial pada tingkat mikro guna mengatasi masalah individu, keluarga dan kelompok kecil.</p>	<p>tentang dasar-dasar manajemen dan pengorganisasian masyarakat.</p>
		<p>2. Mampu menguasai ide-ide dasar teori sosial (<i>social theory</i>) untuk melakukan penelitian kesejahteraan sosial pada masyarakat Muslim.</p>	<p>4. Memiliki pengetahuan tentang metodologi penelitian sosial dan memiliki pengetahuan tentang metode-metode pengembangan masyarakat serta mampu melakukan penelitian untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Islam.</p>
3	<p>Deskripsi generik level 6 (paragraf ketiga)</p> <p><i>Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan</i></p>	<p>1. Mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis dalam menentukan berbagai alternatif penanganan masalah dan pengembangan masyarakat Muslim di tingkat komunitas lokal, kabupaten/kota, provinsi dan</p>	<p>5. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan teori-teori dalam bidang pengembangan masyarakat Islam dan memiliki kemampuan</p> <p>KKNI) 2014. PAGE</p>

	<p><i>data serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.</i></p>	<p>nasional.</p>	<p>dan keberadaan kehidupan masyarakat Islam.</p>
		<p>2. Mampu mengambil keputusan strategis dalam menentukan berbagai alternatif penanganan masalah pada level individu, keluarga dan kelompok kecil yang terjadi pada masyarakat Muslim</p>	<p>6. Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat Islam dan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Islam.</p>
4	<p>Deskripsi generik level 6 (paragraf keempat)</p> <p><i>Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil</i></p>	<p>1. Mampu menunjukkan hasil kerja dalam penanganan masalah pengembangan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan pada pihak yang lebih tinggi.</p>	<p>7. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam <i>team work</i> lintas disiplin ilmu.</p>

	<i>kerja organisasi.</i>	2. Mampu menunjukkan hasil kerja penanganan masalah sosial yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) pada pengguna pelayanan, para pemangku kepentingan dan masyarakat.	8. Bersikap profesional dalam melaksanakan profesinya dan bersikap positif, simpatik dan toleran dalam melaksanakan profesinya.
--	--------------------------	--	---

Mata Kuliah yang Diajarkan di Jurusan PMI

No	Mata Kuliah	S KS	Kompon en	Semes ter
1.	Pendidikan Pancasila	2		I
2	Bahasa Indonesia	2		I
3	Bahasa Inggris I	2		I
4	Bahasa Arab I	2		I
5	Metodologi Studi Islam	2		I
6	ICT	2		I
7	Ulumul Qur'an	2		I
8	Ulumul Hadis	2		I
9	Fiqh/UshulFiqh	2		I
10	QQWT	2		I

11	Ilmu Dakwah	3		I
Jumlah		23		
1	Pendidikan Kewarganegaraan	2		II
2	Sejarah Kebudayaan Islam	2		II
3	Bahasa Arab II	2		II
4	Bahasa Inggris II	2		II
5	Studi Agama-agama	2		II
6	Pengantar Ekonomi	2		II
7	Sistem Ekonomi Islam	2		II
8	Filsafat Umum	2		II
9	Psikologi Umum	2		II
10	Psikologi Sosial	2		II
11	Pengantar Sosiologi	2		II
Jumlah		2		
Jumlah		2		
1	Bahasa Arab III	2		III
2	Bahasa Inggris III	2		III
3	Filsafat Islam	2		III
4	Dasar-dasar PMI	3		III
5	Islam dan Budaya Banten	2		III
6	Dasar-dasar Manajemen	2		III
7	Pengantar Antropologi	2		III
8	Akhlaq Tasawuf	2		III

9	Sosiologi Agama	2		III
10	Filsafat Dakwah	2		III
11	Psikologi Dakwah	2		III
Jumlah		23		

1	Metodologi Penelitian	2		IV
2	Antropologi Budaya	2		IV
4	Sosiologi-Antropologi Masyarakat Muslim	2		IV
5	Politik Islam Kontemporer	2		IV
6	Peta Ekonomi Umat Islam	2		IV
7	Modernisasi dan Perubahan Sosial	2		IV
8	Studi Pembangunan	2		IV
9	Statistik Sosial I	2		IV
10	Manajemen PMI	3		IV
11	Sejarah Sosial Masyarakat Islam Indonesia	2		IV

Jumlah		2		
		1		
1	Sosiologi Perkotaan dan Pedesaan	2		V
2	Sosiologi Pembangunan	2		V
3	Kesejahteraan Sosial	2		V
4	Statistik Sosial II	2		V
5	Analisis Perkembangan Masyarakat Muslim	3		V
6	Manajemen Sumber Daya Manusia	2		V

7	Metodologi Penelitian PMI	2		V
8	Jurnalistik	2		V
9	Pengembangan Masyarakat Desa	3		V
10	Ekologi Pembangunan	2		V
Jumlah		22		
1	Pengelolaan Kesejahteraan Masyarakat Islam	3		VI
2	Kewirausahaan Sosial	3		VI
3	Teknologi Tepat Guna dan Sanitasi Lingkungan	3		VI
4	Teknik Perencanaan dan Rekayasa Sosial	3		VI
5	Pengembangan Komunitas dan Kelembagaan Islam	3		VI
6	Koperasi (pilihan)	4	Pilihan*	VI
	AMDAL (pilihan)			
	Manajemen Tata Ruang (pilihan)			
	Manajemen Sistem Informasi (pilihan)			
	Pengorganisasian Masyarakat (pilihan)			
	Pengantar Studi Gender (pilihan)			
	Pemikiran Modern dalam Islam (pilihan)			
	Studi Teks Pengembangan Masyarakat Muslim (pilihan)			
	Teknik Pengambilan Keputusan (pilihan)			
Jumlah		1		
		9		

1	Bimbingan Penulisan Skripsi	2		VII
2	Kukerta	4		VII
3	Praktikum Profesi PMI	2		VII
	Jumlah	8		
1	Skripsi	6		VIII
	Jumlah	6		
	Jumlah Keseluruhan	1		
		44		

* Mata Kuliah Pilihan (Memilih dua mata kuliah dari sembilan pilihan dengan total 4 Sks)

Mata Kuliah Kompetensi Dasar : 30 Sks (20.83%)

Mata Kuliah Kompetensi Utama : 92 Sks (63.88%)

Mata Kuliah Kompetensi Pendukung dan Pilihan : 22 Sks (15.27%)

144 Sks (100%)

Pembangunan yang Memberdayakan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi seluruh masyarakat, tidak hanya sebagai perseorangan, tetapi lebih penting lagi sebagai sumber daya sosial—himpunan, kelompok, lembaga, dan pranata sosial yang dapat meningkatkan potensi masyarakat. Dari sana tampak bahwa media-media tersebut secara simultan belum dimiliki secara mantap oleh masyarakat dunia ketiga, termasuk Indonesia, yang sedang membangun. Hal demikian terjadi karena mereka tinggal membeli atau mentransfer begitu saja teknologi dari negara-negara maju. Mereka pada umumnya

belum meresapi dan menikmati proses panjang yang harus dilalui bersama dalam melakukan penelitian untuk menemukan dan menciptakan teknologi serta bagaimana pula mereka harus belajar menerima umpan balik yang kritis dari masyarakat pengguna jasa teknologi tersebut.

Dari aspek teknik-teknologis, mereka tinggal mengimpor dari luar negeri atau yang biasa disebut dengan istilah alih teknologi. Dari aspek epistemologis-hermeneutis, mereka juga kurang begitu menyelami persoalan pelik dan mendasar yang sesungguhnya dihadapi. Mereka tinggal menyalin begitu saja dialog dan diskursus epistemologi keilmuan yang disusun oleh dunia industri maju, pengonsep dan penemu berbagai tradisi keilmuan tersebut. Dari aspek pertama (teknis-teknologis) dan aspek kedua (epistemologis-hermeneutis) tidak menjadi persoalan karena memang begitulah jalannya roda sejarah kemanusiaan global. Namun, aspek ketiga (etis-emansipatoris), yakni aspek pengawasan, kontrol, pengendalian, dan kritik banyak mengalami kejanggalan. Para perencana dan pelaku pembangunan terlalu bersikap sensitif terhadap kritik yang bernuansa etis-emansipatoris yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa teknologi. Para perencana dan pelaku pembangunan sering memposisikan diri sebagai “pelaku utama” yang dianggap tidak bersentuhan dengan orang lain dan masyarakat luas. Mereka memposisikan diri sebagai sosok yang berada di luar masyarakat pengguna jasa teknologi itu sendiri.

Wilayah pengawasan, kontrol, dan kritik adalah wilayah etika pembangunan. Kelemahan-kelemahan pada tahap perencanaan dan lebih-lebih lagi pada tahap pelaksanaan hanya bisa dikurangi lewat telaah kritis masyarakat dalam memantau jalannya roda pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak sekedar hanya objek pembangunan, tetapi juga sekaligus sebagai subjek pembangunan. Masyarakat secara keseluruhan sebagai subjek pembangunan tidak harus memposisikan diri seperti konseptor atau perancang pembangunan dan tidak pula memposisikan diri seperti pelaksana pembangunan, tetapi cukup memposisikan diri pada himpunan konsumen dan pengguna jasa teknologi dan pembangunan yang kritis. Selain itu, memfungsikan

diri sebagai pengguna dan konsumen hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nuansa kritis merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi kelangsungan roda pembangunan.

Menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan akan berakibat langsung terhadap kehidupan para konsumen, dalam hal ini adalah rakyat seluruhnya sebagai subjek pembangunan, maka seluruh kebijakan perancang pembangunan perlu melakukan debat publik untuk memperoleh masukan-masukan kritis. Pengawasan, kontrol, pengendalian, dan kritik dari anggota masyarakat tidak harus dipandang sebagai barang tabu. Kritik etis-emansipatoris dari masyarakat luas tidak harus dianggap rival pemerintah, lebih-lebih jika sampai dikategorikan sebagai unsur penghambat jalannya roda pembangunan. Sebaliknya, pendapat mereka harus dianggap sebagai masukan berharga untuk menyempurnakan rencana dan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Pengawasan, kontrol, dan kritik merupakan aset berharga dan sekaligus sebagai sumber daya sosial yang perlu dijadikan mitra oleh para perancang dan pelaksana pembangunan.

Oleh karena itu, ketulusan dan kesungguhan umat Islam di Indonesia untuk menanggapi pembangunan dan modernisasi yang berlangsung di masyarakatnya haruslah tegak di atas nilai-nilai dan prinsip Islami. Sehingga ajaran tersebut lebih merupakan penyeimbang bagi kemajuan acak (*random progress*), dan penerimaan nilai serta pola perilaku yang membabi buta yang tidak sesuai dengan Islam tidak lagi diterima. Tentu saja, peran intelektual muda Muslim dalam membangun dan memberdayakan masyarakat sangatlah krusial karena generasi muda Muslim yang terlatih dan terdidik adalah penentu masa depan bangsa.

Kesimpulan

Sumbangan besar yang diberikan Islam adalah mengarahkan kehidupan dan kegiatan umat manusia kepada orientasi tujuan dan nilai hidup itu sendiri. Perubahan

yang dikehendaki Islam dalam sikap manusia dan demikian juga dalam sikap ilmu-ilmu sosial adalah mengalihkan sikap netral yang samar-samar dari keduanya terhadap nilai tertentu kepada sikap keterbukaan untuk mengikuti dan melaksanakan nilai tertentu itu. Dengan demikian pokok pikiran pertama yang ditekankan di sini adalah bahwa pembangunan ekonomi menurut kerangka Islam sebagaimana dikenal juga dalam ilmu ekonomi pembangunan Islam, keduanya bersumber pada pola atau sistem nilai yang tertuang dalam Kitab Suci Al-Quran dan Sunnah Rasul. Inilah kerangka acuan kita yang pokok.

Kewajiban negara Muslim adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perlu dibantu oleh negara. Diskusi di atas menunjukkan bahwa negara Muslim pada dasarnya merupakan negara sejahtera dan terikat pada tugas untuk memainkan peranan penting di bidang perekonomian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan syariah dalam lapangan ekonomi tersebut. Namun, peranan kesejahteraan ini harus dimainkan dalam kerangka kebebasan perorangan yang oleh Islam dinilai tinggi. Tiang Islam yang terpenting adalah keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan harus patuh kepadaNya dan bahwa salah satu tujuan utama risalah Nabi adalah membebaskan manusia dari segala macam beban yang menempatkannya sebagai budak.

Oleh karena itu, negara sejahtera menurut Islam bukan negara kapitalis dan bukan pula negara sosialis. Negara tersebut dilandasi oleh nilai-nilai Islamnya sendiri dan dibimbing oleh tujuan-tujuannya sendiri pula. Negara sejahtera menurut Islam mempunyai kepribadiannya sendiri dan tidak mirip dengan negara lain dalam bentuk apapun.

Sebagai penutup, sekali lagi, generasi muda intelektual Muslim memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberdayakan masyarakat dan mewujudkan semua cita-cita masyarakat. Intelektual muda Muslim yang dimaksud adalah intelektual muda Muslim yang diharapkan lahir dari mahasiswa Jurusan PMI

yang mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat.

Daftar Pustaka

BPS (2010). *Sensus Penduduk 2010*, diakses dari <http://sp2010.bps.go.id>

LPM IAIN “SMH” Banten (2014). *Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 2014*.